

KATALOG: 4102004.6404

# INKESRA 2019

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019



KATALOG: 4102004.6404

# INKESRA 2019

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019





# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019**

ISSN: 2655.4097

Nomor Publikasi: 64040.2025

Katalog: 4102004.6404

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xiv+ 88 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Canva

Freepik

Infografis:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Canva

Freepik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur

Dicetak Oleh:

CV. Siswa

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**TIM PENYUSUN**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019**

**Pengarah**

Akhmad Junaidi, S.E, M.Si

**Penanggungjawab**

Rizka Maulina, SST, M.Si

**Penyunting**

Rizka Maulina, SST, M.Si

**Penulis**

Shafira Murni, S.ST  
Khusnul Chotimah, S.Tr.Stat

**Pengolah Data**

Shafira Murni, S.ST  
Khusnul Chotimah, S.Tr.Stat

**Desain/Layout & Gambar Kulit:**

Shafira Murni, S.ST  
Khusnul Chotimah, S.Tr.Stat

## Kata Pengantar

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 ini merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya yang dirilis setiap tahunnya. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS (Data Primer) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta data yang berasal dari instansi lain (Data Sekunder), dengan maksud untuk memberikan gambaran umum keadaan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Timur.



Publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi enam bidang, yaitu Kependudukan; Kesehatan; Pendidikan; Ketenagakerjaan; Pengeluaran Rumah Tangga dan Kemiskinan serta Perumahan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang.

Sangatta, November 2019  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Kutai Timur,



Akhmad Junaidi, SE., M.Si  
NIP. 19660420 199103 1 001



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xiii
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Metodologi	5
1.4. Sistematika Penyajian	5
1.5. Konsep dan Definisi	6
<b>2. KEPENDUDUKAN DAN KB</b>	
2.1 Jumlah Penduduk	18
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	19
2.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana	23
<b>3. KESEHATAN</b>	
3.1 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan	32
3.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	34
3.3 Tenaga Penolong Persalinan	37
3.4 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)	39
<b>4. PENDIDIKAN</b>	
4.1 Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan	44
4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	48
<b>5. KETENAGAKERJAAN</b>	
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja	54
5.2 Lapangan Pekerjaan	59
<b>6. PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN</b>	

6.1	Pengeluaran Rumah Tangga	65
6.2	Penduduk Miskin	69
<b>7.</b>	<b>PERUMAHAN</b>	
7.1	Fasilitas Rumah Tinggal	76
7.2	Kualitas Rumah Tinggal	84

<https://kutimkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	19
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	22
Tabel 2.3	Persentase Penduduk 10 Tahun Ketas menurut Status Perkawinan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	23
Tabel 2.4	Persentase Wanita 10 Tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	25
Tabel 3.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2019	33
Tabel 3.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2019	35
Tabel 3.3	Persentase Penduduk yang berobat jalan menurut Tempat Berobat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2019	36

Tabel 3.4	Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang pernah diberi ASI menurut Rata-rata Lama Pemberian ASI di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	40
Tabel 4.1	Angka Melek Huruf penduduk 15 tahun Keatas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019	45
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Usia Sekolah di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019	49
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019	50
Tabel 5.1	Perkembangan persentase penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019	54
Tabel 5.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019	56
Tabel 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019	57
Tabel 5.4	Tingkat Kesempatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019	58

Tabel 5.5	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019	59
Tabel 6.1	Pengeluaran Sebulan untuk Makanan menurut Jenis Kelompok Makanan (Rp) di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	66
Tabel 6.2	Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Kelompok Bukan Makanan (Rp) di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	68
Tabel 6.3	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2019	70
Tabel 6.4	Nilai Batas Garis Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019	70
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019	78
Tabel 7.2	Persentase Rumah tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2019	79
Tabel 7.3	Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2019	86



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Persentase Persebaran Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	21
Grafik 2.2	Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	26
Grafik 2.3.	Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Cara KB yang Dipakai, Tahun 2019	27
Grafik 3.1	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2019	38
Grafik 4.1	Persentase penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019	46
Grafik 4.2	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	48
Grafik 7.1	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak dan Air Minum Tidak Layak di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019	80
Grafik 7.2	Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Pembuangan Limbah Terdekat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2019 (meter)	83



# BAB 1

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019

# PENDAHULUAN

BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR





## 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat yang termuat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kutai Timur adalah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tekad pemerintah daerah Kutai Timur. Pembangunan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan, politik dan bidang lainnya merupakan bidang-bidang pembangunan yang harus dinikmati oleh semua masyarakat Kutai Timur tanpa membedakan suku, agama, partai politik dan sebagainya.

Untuk dapat melihat sampai sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan sehingga program pembangunan berikutnya dapat lebih dioptimalkan.

Dalam memonitor pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat di Kutai Timur, diperlukan indikator-indikator yang dapat memberikan

## *Pendahuluan*

gambaran tentang kondisi kesejahteraan penduduk Kabupaten Kutai Timur. Disadari bahwa dimensi kesejahteraan rakyat sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan hanya dapat terlihat (*visible*) melalui aspek tertentu. Oleh karena itu dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumahtangga dan kemiskinan, serta perumahan.

Setiap aspek disajikan secara terpisah dalam bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan diukur. Publikasi ini hanya menyajikan kondisi kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan terukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

### **1.2. Tujuan**

Tujuan secara umum pembuatan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur 2020 dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan tujuan secara khusus untuk mengetahui tingkat perkembangan dan persebaran penduduk Kutai Timur, memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pengeluaran rumahtangga dan kemiskinan serta perumahan.

Dengan tersedianya publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kebijakan pembangunan terkait kesejahteraan rakyat Kutai Timur.

### **1.3 Metodologi**

Dalam menyusun publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kutai Timur 2020 ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil beberapa survei yang telah dilaksanakan BPS seperti Susenas dan Sakernas serta data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi terkait.

Adapun metodologi yang diterapkan dalam menyajikan publikasi ini adalah dengan metode deskriptif. Melalui metode ini, potret kesejahteraan rakyat Kutai Timur 2020 akan dianalisis sesuai dengan tabel-tabel yang tersedia.

### **1.4 Sistematika penyajian**

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam tujuh bagian. Masing-masing bagian disajikan uraian secara rinci sesuai dengan tema besar bahasan dalam buku ini. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan fenomena yang melatarbelakangi penyusunan buku ini, tujuan, metodologi dan sistematika penyajian serta konsep yang digunakan. Bab II menyajikan kondisi kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Kutai Timur yakni mencakup jumlah, persebaran dan kepadatan penduduk, serta Keluarga Berencana. Bagian selanjutnya (Bab III) menyajikan kondisi kesehatan mencakup derajat dan status kesehatan penduduk, tenaga penolong persalinan, pemberian ASI bagi Balita dan pemanfaatan fasilitas kesehatan.

Gambaran mengenai kondisi pembangunan dalam bidang pendidikan disajikan pada Bab IV yang meliputi angka partisipasi yang mencakup partisipasi sekolah, partisipasi kasar dan partisipasi murni,

## *Pendahuluan*

putus sekolah, angka melek huruf dan pendidikan yang ditamatkan. Pada Bab V disajikan data ketenagakerjaan yang berisi tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesempatan kerja, lapangan pekerjaan. Bab VI menjelaskan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yang dilihat dari besar pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, serta menyajikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur. Pada Bab VII, menjelaskan kondisi perumahan dan lingkungan di Kabupaten Kutai Timur yang ditinjau dari fasilitas dan kualitas rumah tinggal.

### **1.5 Konsep dan Definisi**

- a. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian dan akses ke fasilitas perkotaan.
- b. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

- c. **Rumah Tangga Khusus** adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.
- d. **Kepala Rumah Tangga** adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- e. **Anggota Rumah Tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.  
Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).  
Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.
- f. **Kawin** adalah mempunyai istri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya),

## *Pendahuluan*

tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

- g. **Cerai Hidup** adalah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil dianggap sebagai cerai hidup.
- h. **Cerai Mati** adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.
- i. **Anak Lahir Hidup**: Anak Lahir Hidup adalah semua anak yang waktu lahir memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis dan tanda-tanda kehidupan lainnya.
- j. **Anak Masih Hidup** adalah anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.
- k. **Pendidikan**:  
Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat,

SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi (PT).

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- l. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
- m. **Tamat Sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- n. **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

## *Pendahuluan*

Belum tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP umum, madrasah tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

SMA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

- o. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.
- p. **Angka Buta Huruf** adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.
- q. **Angka Partisipasi;** terdiri dari 3 jenis yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Angka Partisipasi Sekolah (APS): proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$APS_{7-12} = \frac{P_{7-12} \text{ Masih Sekolah}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$P_{7-12}$  = Penduduk Usia 7-12 tahun

- (2) Angka Partisipasi Murni (APM) : Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

$$APM_{7-12} = \frac{P_{7-12} SD}{P_{7-12}} \times 100\%$$

- (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) : Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

$$APK_{SD} = \frac{P_{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

- r. **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.
- s. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.
- t. **Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan** adalah penolong kelahiran terakhir oleh dokter, bidan, dan tenaga medis.

## Pendahuluan

- u. **ASI (Air Susu Ibu)** adalah satu-satunya makanan terbaik bagi bayi dan juga makanan alami, yang komposisinya memenuhi seluruh kebutuhan bayi selama enam bulan. ASI mengandung zat kekebalan yang memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit dan juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Menyusui dengan rasa kasih sayang dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi.
- v. **Mengobati sendiri** adalah upaya ART yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra).
- w. **Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang menganggur. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

**Menganggur** adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang dikategorikan sebagai penganggur adalah mereka yang sedang:

- (1) Mencari pekerjaan;
- (2) Mempersiapkan suatu usaha;
- (3) Sudah diterima bekerja namun belum memulainya, dan

- (4) Mereka yang tidak mencari pekerjaan akibat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

**Mencari Pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

**Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja.

**Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh/karyawan.

**Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

## Pendahuluan

- x. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
- y. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

- z. **Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah persentase angkatan kerja yang menganggur dan tidak sedang mempunyai pekerjaan.

TPT dihitung dengan rumus:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Orang yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

# BAB 2

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019

# KEPENDUDUKAN

<http://www.kab.kutaitimur.go.id>

BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR



## BAB 2 KEPENDUDUKAN

INKESRA



Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Penduduk dapat berperan sebagai subyek pembangunan, dimana penduduk menjadi penggerak kegiatan pembangunan, tidak hanya menikmati hasil tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan. Di sisi lain, penduduk sebagai obyek pembangunan, yakni pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran masyarakat dan hasilnya dapat dinikmati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek kependudukan, terutama kapasitas penduduk suatu wilayah.

Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar namun diikuti dengan tingkat kualitas penduduk yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan dan akan menghambat jalannya proses pembangunan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan agar potensi penduduk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan suatu wilayah adalah dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal,

perencanaan berasal dari bawah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Karena masalah kependudukan memiliki posisi yang penting bagi pembangunan daerah, maka data kependudukan sangat diperlukan dalam penentuan kebijakan maupun perencanaan program terkait. Data kependudukan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan program kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Pada tingkat nasional, terdapat isu kependudukan terkait bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia selama periode 2020-2030. Oleh karena itu, di bidang kependudukan, perlu disusun rencana strategis pemerintah dalam menghadapi *the windows of opportunity*. Bonus demografi didefinisikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya Rasio Ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang (Wongboonsin *et. al.* 2003). Pada periode dengan bonus demografi, belanja publik yang semula diperuntukkan bagi program-program sosial dapat dialihkan untuk investasi pada sektor produktif maupun infrastruktur.

### **2.1 Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Penduduk Kutai Timur menurut perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur sekitar 376.111 jiwa. Mayoritas penduduk berada di Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibukota Kabupaten Kutai Timur

## Kependudukan

sebanyak 106.504 jiwa, diikuti Kecamatan Bengalon sebanyak 33.609 jiwa dan Kecamatan Sangatta Selatan sebesar 26.812 jiwa.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur**  
**Tahun 2019**

Kecamatan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)
Muara Ancalong	18 334
Busang	6 325
Long Mesangat	6 214
Muara Wahau	23 067
Telen	8 455
Kongbeng	22 919
Muara Bengkal	16 596
Batu Ampar	6 143
Sangatta Utara	106 504
Bengalon	33 609
Teluk Pandan	18 026
Sangatta Selatan	26 812
Rantau Pulung	10 544
Sangkulirang	23 750
Kaliorang	11 734
Sandaran	9 521
Kaubun	14 199
Karangan	13 359
<b>Kutai Timur</b>	<b>376 111</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur , Proyeksi Penduduk 2010-2035

## 2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Adapun kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, yang memperlihatkan rata-rata jumlah penduduk setiap kilometer persegi. Persebaran penduduk yang tidak

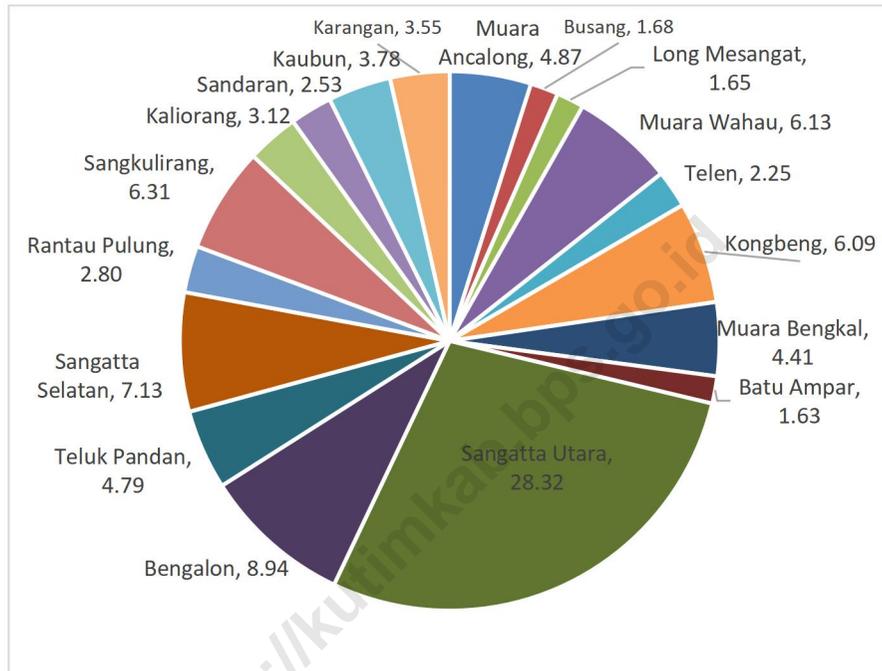
## *Kependudukan*

merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan. Persebaran penduduk di Kutai Timur secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar daerah yang cukup besar.

Kecenderungan penduduk tinggal pada daerah pusat pemerintahan dan perdagangan menyebabkan terjadinya pengelompokan pada daerah ibukota kabupaten. Sebagian besar penduduk lainnya akan berpindah pada daerah sekitar daerah ibukota kabupaten. Dalam hal ini Kecamatan Sangatta Utara sebagai ibukota kabupaten menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, sedangkan Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangatta Selatan mengalami penambahan penduduk sebagai dampak dari daerah sekitar pusat ibukota kabupaten.

Berdasarkan Grafik 2.1 dibawah, pada tahun 2019 di Kutai Timur persebaran penduduknya yang terbanyak di Kecamatan Sangatta Utara, yaitu sekitar 28,32 persen dari seluruh total penduduk. Selanjutnya adalah di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangatta Selatan masing-masing sebesar 8,94 persen dan 7,13 persen. Di wilayah lain persebarannya di bawah 7 persen. Wilayah yang persebaran penduduknya paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar sebesar 1,63 persen.

**Grafik 2.1**  
**Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur , Proyeksi Penduduk 2010-2035

Pada Tabel 2.2 terlihat bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan yang jauh dari ibukota memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Namun bila dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Kutai Timur memiliki persebaran luas wilayah yang berbeda antar kecamatan. Hal ini berdampak pada keberagaman kepadatan penduduk antar kecamatan. Secara umum, pada tahun 2019 kepadatan penduduk di Kutai Timur sebesar 11 jiwa per km<sup>2</sup>, yang dapat diartikan bahwa setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah dihuni oleh 11 jiwa. Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung, yang mencapai 84 dan 73 jiwa setiap km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk yang terendah, pada

kisaran di bawah 10 jiwa setiap km<sup>2</sup> adalah di wilayah Kecamatan Muara Ancalong, Busang, Muara Wahau, Telen, Sangkulirang, Sandaran, dan Karangan. Pola persebaran dan kepadatan penduduk yang demikian kurang menguntungkan bagi pengembangan daerah sehingga menciptakan disparitas yang tajam antara wilayah Kecamatan.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km<sup>2</sup>)**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
Muara Ancalong	18 334	2 739,30	7
Busang	6 325	3 721,61	2
Long Mesangat	6 214	526,98	12
Muara Wahau	23 067	5 724,32	4
Telen	8 455	3 129,61	3
Kongbeng	22 919	581,27	39
Muara Bengkal	16 596	1 522,80	11
Batu Ampar	6 143	204,50	30
Sangatta Utara	106 504	1 262,59	84
Bengalon	33 609	3 196,24	11
Teluk Pandan	18 026	831,00	22
Sangatta Selatan	26 812	1 660,85	16
Rantau Pulung	10 544	143,82	73
Sangkulirang	23 750	3 322,80	7
Kaliorang	11 734	438,91	27
Sandaran	9 521	3 419,30	3
Kaubun	14 199	257,45	55
Karangan	13 359	3 064,36	4
<b>Kutai Timur</b>	<b>376 111</b>	<b>35 747,71</b>	<b>11</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur , Proyeksi Penduduk 2010-2035

### 2.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Komposisi penduduk menurut status perkawinan dapat menunjukkan kondisi fertilitas suatu wilayah. Status perkawinan dibagi menjadi empat, yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Semakin besar jumlah penduduk yang berstatus kawin, semakin besar pula peluang tingkat kelahiran di wilayah tersebut.

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan dan jenis kelamin tahun 2019. Secara umum penduduk Kutai Timur berstatus kawin mempunyai proporsi terbesar yaitu 60,37 persen, kemudian disusul penduduk berstatus belum kawin sebesar 33,68 persen. Sedangkan penduduk berstatus cerai 5,95 persen.

**Tabel 2.3**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut**  
**Status Perkawinan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019**

Status Perkawinan	Penduduk (%)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	38,64	27,72	33,68
Kawin	56,34	65,22	60,37
Cerai	5,02	7,06	5,95
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2019

Penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin (38,64 persen) lebih besar dibanding penduduk perempuan (27,72 persen). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang berstatus kawin (65,22 persen) lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki (56,34 persen).

Kondisi yang sama juga terlihat untuk penduduk perempuan (7,06 persen) yang berstatus cerai persentasenya lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki (5,02 persen).

Penundaan usia perkawinan pertama dan program keluarga berencana (KB) pada wanita merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Dengan penundaan usia perkawinan pertama akan berdampak memperpendek masa reproduksi, sedangkan semakin muda seseorang melakukan perkawinan, maka akan semakin panjang masa reproduksinya dan akan memperbesar peluang orang tersebut untuk melahirkan anak lebih banyak. Dengan demikian memungkinkan terjadinya tingkat fertilitas yang lebih tinggi.

Namun, wanita yang kawin pada usia sangat muda cenderung belum memiliki kesiapan yang matang, baik secara mental maupun fisiknya. Risiko yang dihadapi cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan, yang akan berpengaruh pada keselamatan ibu dan anak. Salah satu cara yang dapat membantu menunda usia perkawinan pertama bagi wanita adalah memberi kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi, karena akan meningkatkan pengetahuan mereka, khususnya tentang risiko kawin muda bagi ibu sehingga menjadikan mereka berani mengambil keputusan untuk tidak melakukan perkawinan pada usia yang terlalu muda.

**Tabel 2.4**  
**Persentase Wanita 10 Tahun Keatas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019**

Tahun	Umur Kawin Pertama			Total
	≤ 16	17-18	≥19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	19,45	20,55	60	100,00
2018	16,79	21,96	61,25	100,00

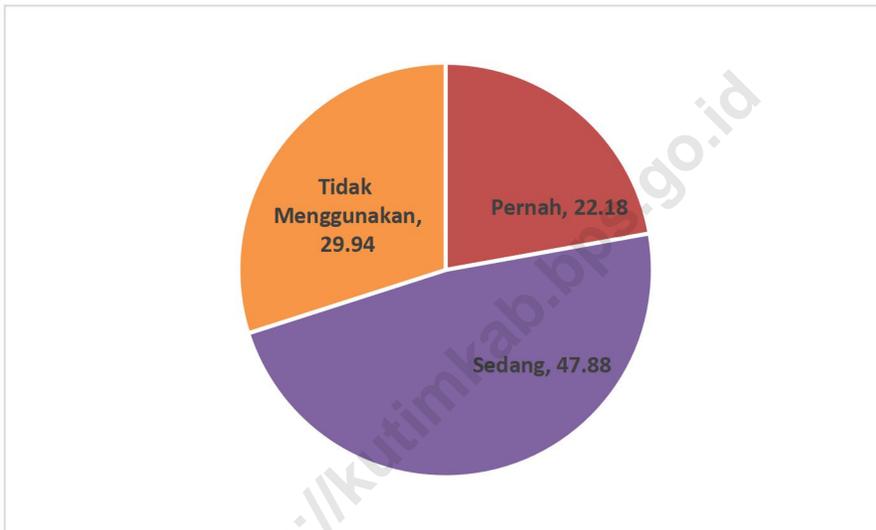
Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2019

Komposisi penduduk wanita menurut usia perkawinan pertama di Kutai Timur yakni 19,45 persen berusia 16 tahun kebawah pada tahun 2019, hal ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 (16,79 persen). Persentase wanita pada usia perkawinan pertama yang berumur 17-18 tahun sebanyak 20,55 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 (21,96 persen). Untuk usia perkawinan pertama yang lebih matang yaitu usia 19 tahun keatas sebanyak 60 persen, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018 (61,25 persen).

Dari Tabel 2.4 dapat dilihat meskipun mayoritas wanita di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 melangsungkan perkawinan pertamanya pada usia matang (19 tahun keatas), namun persentase ini menurun dibandingkan tahun 2018. Hal ini sejalan dengan penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada perempuan berusia 16-18 tahun ke atas di Kutai Timur pada 2019 yang menurun menjadi 75,05 setelah sebelumnya berada di tingkat 79,22 persen di tahun 2018. Artinya, pada tahun 2019 ada fenomena menurunnya kesadaran dan pendidikan tentang usia kawin dan kesehatan reproduksi yang dianjurkan bagi wanita,

sehingga menyebabkan percepatan perkawinan di usia yang lebih muda (16 tahun ke bawah dan usia 17-18 tahun)

**Grafik 2.2**  
**Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019**



*Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional*

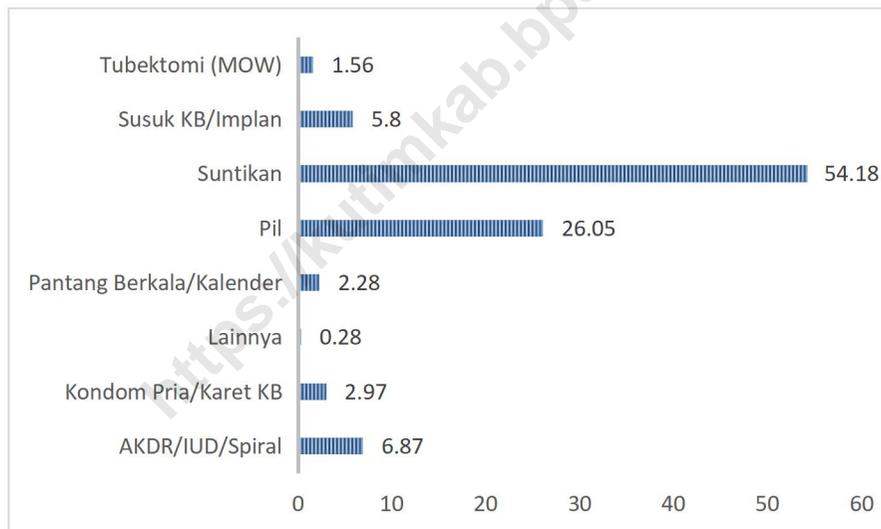
Pada tahun 2019 sekitar 22,18 persen wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus pernah kawin menyatakan pernah menggunakan alat/cara KB, angka ini mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11,59 persen tahun 2018. Sementara yang menyatakan sedang menggunakan alat/cara KB sekitar 47,88 persen, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 58,40 persen tahun 2018.

Menunda/menjarangkan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi merupakan upaya untuk menurunkan tingkat fertilitas. Pilihan

## *Kependudukan*

penggunaan alat/cara KB oleh akseptor diantaranya dipengaruhi oleh harga, ketersediaan dan kemudahan untuk mengakses alat/cara tersebut, dan sebagainya. Jika terjadi kenaikan harga alat kontrasepsi yang tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikhawatirkan pemakaian alat kontrasepsi akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan ketersediaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi dapat mempengaruhi pilihan penggunaan alat kontrasepsi.

**Grafik 2.3**  
**Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin menurut Cara KB yang Dipakai, Tahun 2019**



*Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Alat kontrasepsi jika tersedia dan mudah diperoleh, ada kecenderungan alat kontrasepsi tersebut akan digunakan. Suntik merupakan alat KB yang banyak dipilih wanita pernah kawin di Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2019, metode suntik digunakan oleh sekitar 54,18 persen akseptor KB dimana angka ini kembali meningkat setelah sebelumnya menurun di tahun 2018 (44,77 persen). Masih tingginya

prevalensi pemakaian alat KB Suntik ini diduga akibat biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat/cara KB ini relatif lebih terjangkau dan lebih mudah didapatkan. Selanjutnya pilihan alat KB kedua terbesar pada tahun 2019 di Kabupaten Kutai Timur adalah metode Pil yakni 26,05 persen. Meskipun merupakan persentase kedua tertinggi, angka ini menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu 27,58 persen. Di posisi terbesar ketiga pada 2019, yaitu penggunaan alat KB IUD/Spiral sebesar 6,87 persen yang meningkat bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,49 persen. Penggunaan alat KB Susuk mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 5,8 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,3 persen.

Selain menerapkan KB dengan alat, wanita berusia 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Kutai Timur juga ada yang menerapkan KB secara tradisional/Pantang Berkala. Pada tahun 2019 terdapat 2,28 persen wanita yang menerapkan metode ini, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya 0,64 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat penggunaan KB dengan metode Tubektomi/MOW (Medis Operasi Wanita) sebesar 1,56 persen dan penggunaan kondom/karet pria sebesar 2,97 persen.

# BAB 3

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019

# KESEHATAN

BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR





# BAB 3 KESEHATAN

INKESRA

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Status kesehatan masyarakat suatu daerah dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan daerah tersebut dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Apabila pemenuhan kesehatan dapat terwujud maka akan lahir SDM berkualitas yang merupakan modal utama dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan dalam keadaan sehat, maka seseorang dapat berbuat, berkarya, berkreasi, dan melakukan kegiatan produktif lainnya. SDM yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Secara langsung ataupun tidak langsung, gangguan kesehatan atau penyakit akan mempengaruhi produktivitas dan perekonomian rumah tangga. Penyebabnya adalah biaya untuk pengobatan, hilangnya waktu kerja atau sekolah, dan hilangnya aset keluarga. Sakit secara langsung meningkatkan pengeluaran rumah tangga, yaitu biaya pengobatan (termasuk transport). Penduduk pada kelompok usia produktif, jika sakit akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterimanya, sedangkan pada kelompok anak sekolah akan kehilangan waktu untuk menuntut ilmu. Pada kasus penyakit kronis atau berat, orang akan terpaksa menjual aset keluarga (seperti: tanah, rumah, perhiasan, dan lain-lain) untuk biaya pengobatan.

## *Kesehatan*

Untuk mewujudkan keadaan sehat, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas fisik penduduk yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh penduduk baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik, dalam hal ini dapat dilihat melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

### **3.1 Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan**

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari akan berjalan dengan lancar baik bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Hal ini dikarenakan bila tingkat kesehatan penduduk pada level yang relatif tinggi maka akan memungkinkan mereka mampu mencurahkan seluruh ketrampilan, keahlian, dan kreatifitas selama jam-jam kegiatan mereka. Sebaliknya, jika tingkat kesehatan penduduk berada pada kondisi yang kurang baik maka mereka cenderung kurang berperan serta dalam menciptakan tingkat efisiensi pekerjaan yang tinggi. Salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan.

Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu, sedangkan angka kesakitan yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

Tabel 3.1 memperlihatkan perkembangan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan referensi. Penduduk yang pernah mempunyai keluhan kesehatan mengalami kenaikan dari 21,50 persen pada tahun 2018 naik menjadi 27,91 persen pada tahun 2019. Jika dilihat menurut jenis kelamin persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dibanding laki-laki dimana masing-masing sebesar 30,16 persen untuk penduduk perempuan dan 25,98 persen untuk penduduk laki-laki.

**Tabel 3.1**  
**Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2019**

Jenis Kelamin	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Keluhan Kesehatan</b>		
Laki-Laki	20,99	25,98
Perempuan	22,09	30,16
Laki-Laki + Perempuan	21,50	27,91
<b>Angka Kesakitan</b>		
Laki-Laki	9,82	11,74
Perempuan	10,49	13,25
Laki-Laki + Perempuan	10,13	12,43

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019

## *Kesehatan*

Selain keluhan kesehatan, pada Tabel 3.1 juga ditampilkan perkembangan angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami sakit dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 naik dari 10,13 persen menjadi 12,43 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni angka kesakitan perempuan sebesar 13,25 persen sementara angka kesakitan laki-laki pada tahun 2019 sebesar 11,74 persen, keduanya meningkat dibandingkan tahun 2018 yang masing-masing sebesar 10,49 persen dan 9,82 persen.

### **3.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan**

Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat merupakan gambaran dari pola pikir masyarakat tersebut, salah satu indikator untuk mengukur kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat adalah akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Di satu sisi, semakin sering masyarakat melakukan konsultasi atau pengobatan/perawatan ke fasilitas kesehatan, mengisyaratkan semakin tinggi kepedulian atau kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan. Namun di sisi lain, semakin tinggi angka kunjungan ke fasilitas kesehatan mengisyaratkan semakin tinggi juga tingkat keluhan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat akan dapat diatasi.

Sehingga akan tercipta masyarakat yang sehat dan pada gilirannya akan terwujud sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan produktif. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan harus didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang cukup baik, kemudahan akses, serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Dari hasil Susenas dapat disajikan data tentang upaya pengobatan yang dilakukan penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, baik dengan cara berobat sendiri maupun berobat jalan. Pada tahun 2019 persentase penduduk yang berobat jalan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Penduduk Kutai Timur yang berobat jalan pada tahun 2018 sebesar 59,63 persen turun menjadi 47,40 persen pada tahun 2019 (Tabel 3.2). Sedangkan, penduduk yang berobat sendiri persentasenya meningkat dari tahun 2018 sebesar 40,37 persen naik menjadi 52,60 persen tahun 2019.

**Tabel 3.2**  
**Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2019**

Jenis Kelamin	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Penduduk yang Berobat Jalan</b>		
Laki-Laki	57,31	42,22
Perempuan	62,24	52,61
Laki-Laki + Perempuan	59,63	47,40
<b>Penduduk yang Berobat Sendiri</b>		
Laki-Laki + Perempuan	40,37	52,60

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

## Kesehatan

Tempat rujukan penduduk untuk berobat jalan dapat menggambarkan akses penduduk untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Penduduk Kabupaten Kutai Timur secara umum lebih banyak memilih berobat ke Puskesmas dan praktek dokter/poliklinik. Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan berobat ke Puskesmas mencapai 35,00 persen pada tahun 2019, angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (35,31 persen). Fasilitas kesehatan sebagai tempat berobat penduduk selain Puskesmas adalah praktek dokter/poliklinik dan Rumah Sakit. Persentase penduduk yang berobat jalan ke praktek dokter/poliklinik pada tahun 2019 sebesar 38,01 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (36,05 persen).

**Tabel 3.3**  
**Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2019**

Fasilitas kesehatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Rumah sakit	29,86	34,94
Praktek Dokter/poliklinik	36,05	38,01
Puskesmas	35,31	35,00
UKBM*	1,96	0,00
Tradisional& lainnya	0,86	0,36

\*UKBM terdiri dari poskesdes, posyandu, dan balai pengobatan

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Persentase penduduk yang berobat jalan ke Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Swasta ataupun Pemerintah, cukup mengalami peningkatan dari 29,86 persen pada tahun 2018 menjadi 34,94 persen pada tahun 2019. Sedangkan penduduk yang berobat ke UKBM (poskesdes, posyandu dan balai pengobatan) tahun 2019 tidak ada lagi (0 persen).

Fasilitas kesehatan tradisional merupakan tempat alternatif untuk berobat bagi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan tradisional disini adalah praktek pengobatan tradisional, dukun beranak dan tempat pengobatan lainnya. Pada tahun 2019 persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan ini sebesar 0,36 persen, mengalami penurunan dari tahun 2018 (0,86 persen).

### **3.3 Tenaga Penolong Persalinan**

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, selain ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga penolong persalinan. Hal ini berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu saat melahirkan. Tenaga penolong persalinan menentukan keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong selanjutnya. Data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan secara umum.

## Kesehatan

Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dianggap lebih baik daripada yang ditolong oleh dukun atau lainnya, karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Walau demikian, di Kutai Timur masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun maupun tenaga lainnya. Bahkan pada Susenas Maret 2018, di Kutai Timur ditemukan kasus seorang ibu melahirkan sendiri tanpa bantuan. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang biasanya terdapat di daerah perdesaan. Selain itu, faktor pendidikan dari masyarakat juga turut mempengaruhi dalam hal pemilihan penolong persalinan.

**Grafik 3.1**  
**Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Proses Penolong Kelahiran di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2019**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun menurut proses penolong persalinan terakhir di Kabupaten Kutai Timur oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, tenaga kesehatan lainnya) pada tahun 2019 sebesar 98,92 persen yang berarti terjadi mayoritas persalinan di Kabupaten Kutai Timur terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan proses penolong kesehatan terakhir oleh Bidan yang mencapai angka 69,76 persen. Adapun persentase balita dengan penolong persalinan terakhir oleh Dokter Kandungan mengalami penurunan, pada tahun 2019 menjadi 19,56 persen sedangkan pada tahun 2018 bisa mencapai 36,05 persen. Tampaknya pada 2019, terjadi peralihan penolong persalinan terakhir oleh Dokter Kandungan menjadi Bidan.

### **3.4 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)**

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan. Usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan lebih baik jika dilakukan sejak dini. Salah satu faktor penting yang memiliki pengaruh dalam upaya tersebut adalah pemberian air susu ibu (ASI). ASI mengandung semua bahan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bahkan bahan tersebut bernilai gizi tinggi dan serasi untuk kebutuhan bayi seperti laktosa serta bermacam bahan lemak dan protein. Di dalamnya terdapat pula bermacam bahan lain yang sangat dibutuhkan seperti enzim, komponen bioaktif (Roslina Siregar, dkk 1993., Menyusui dan Kesehatan Anak). Selain itu, ASI juga mengandung zat kekebalan tubuh (penolak/pencegah penyakit) serta

dengan memberikan ASI kepada balita akan memberikan kedekatan batin dan menumbuhkan kasih sayang antara ibu dengan anak.

Kesadaran ibu untuk memberikan gizi yang baik pada anaknya secara kuantitatif dapat ditunjukkan oleh angka persentase tertinggi untuk masa menyusui sampai bayi berusia 24 bulan. Di Kabupaten Kutai Timur tahun 2019, pada balita berusia kurang dari 2 tahun (baduta), 70,46 persen di antaranya diberi ASI selama 6-23 bulan sementara sisa lainnya yaitu sebanyak 29,54 persen hanya diberi ASI hingga usia <6 bulan. Sementara secara umum, rata-rata lama pemberian ASI pada baduta di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 adalah selama 11,45 bulan.

**Tabel 3.4**  
**Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI menurut Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019**

Lamanya Disusui (Bulan)	2019
(1)	(2)
<6	29,54
6-23	70,46
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

# BAB 4

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019

# PENDIDIKAN

<http://www.kab.kutaitimur.go.id>

BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR





# BAB 4

## PENDIDIKAN

INKESRA

Sumber daya manusia (SDM) yang bermoral dan berkualitas sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan suatu bangsa. Pentingnya ketersediaan SDM yang bermoral dan berkualitas menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang pembangunan yang harus diperhatikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang memberi andil yang besar bagi kelanjutan pembangunan di masa datang, karena pendidikan dinilai sebagai pintu masuk untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.

Maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya, dan akan semakin majulah bangsa tersebut. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan diantaranya mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, 20 persen anggaran pendidikan dan bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

## *Pendidikan*

Kondisi pembangunan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan. Indikator pendidikan dibagi menjadi tiga macam yaitu indikator input, indikator proses, dan indikator output. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator output merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator output antara lain angka melek huruf, angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.

### **4.1 Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan**

Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan

tertulis, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan dengan kemampuan baca tulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Hal ini mengandung arti bahwa melek huruf merupakan indikator paling dasar dalam telaah masalah pendidikan di suatu daerah.

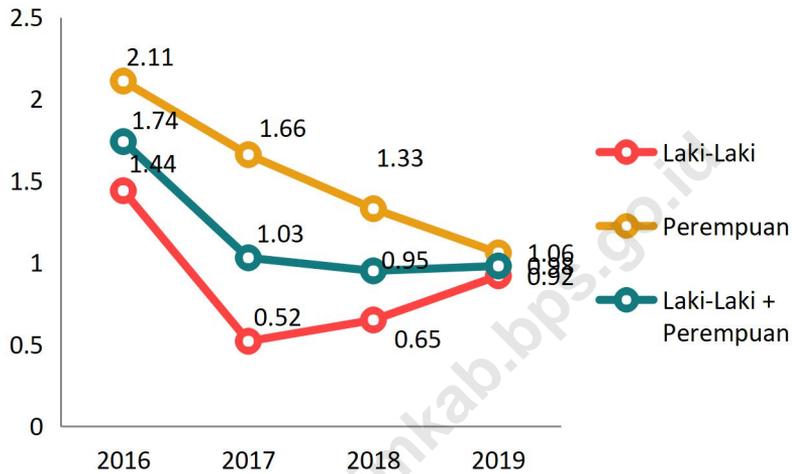
**Tabel 4.1**  
**Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019**

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	98,56	99,48	99,35	99,08
Perempuan	97,89	98,34	98,67	98,94
Laki-Laki + Perempuan	98,26	98,97	99,05	99,02

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Angka melek huruf di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 99,02 persen. Angka melek huruf bila dilihat menurut jenis kelamin penduduk, angka melek huruf penduduk laki-laki pada tahun 2019 sekitar 99,08 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka melek huruf penduduk perempuan sebesar 98,94 persen. Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis baik huruf latin dan atau huruf lainnya, semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.

**Grafik 4.1**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019**



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

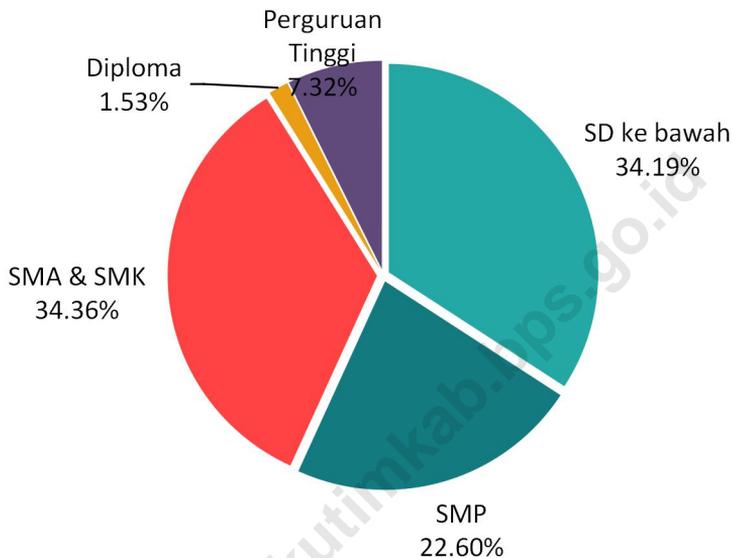
Pada tahun 2019 terdapat sekitar 0,98 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf di Kabupaten Kutai Timur. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi 2018 yakni 0,95 persen. Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2019 penduduk perempuan buta huruf sebesar 1,06 persen sedangkan penduduk laki-laki sebesar 0,92 persen.

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk, baik yang tidak/belum sekolah, masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut ijazah/STTB (Surat Tanda

Tamat Belajar) yang dimiliki. Dengan diketahuinya jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan, karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat memberi gambaran tentang jenjang pendidikan tertinggi yang dapat ditamatkan dan keadaan kualitas manusianya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2019, sebagian besar tamat SMA dan SMK yaitu sebanyak 34,36 persen dan tamat SD ke bawah sebesar 34,19 persen. Secara rinci proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Grafik 4.2.

**Grafik 4.2**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

#### 4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

Pemerintah berupaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan yang bertujuan meningkatkan pemerataan

fasilitas pendidikan, sehingga akan semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan sarana prasarana pendidikan yang menjangkau sampai ke pelosok daerah, serta adanya program wajib belajar telah mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk.

APS penduduk di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 mengalami penurunan di setiap kelompok umur baik kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Pada kelompok penduduk usia 7-12 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurun dari 99,66 persen pada tahun 2018 menjadi 99,65 persen pada tahun 2019. APS pada kelompok umur 13-15 tahun menurun dari 98,53 persen pada tahun 2018 menjadi 98,21 persen pada tahun 2019. Sedangkan APS umur 16-18 tahun dari 79,19 persen pada tahun 2018 menurun menjadi 78,95 persen pada tahun 2019. Penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di ketiga kelompok umur penduduk ini bisa disebabkan oleh peningkatan APS di kelompok umur lain (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 18 tahun).

**Tabel 4.2**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Usia Sekolah di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019**

Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12	99,60	99,17	99,66	99,65
13-15	95,67	97,36	98,53	98,21
16-18	71,79	81,77	79,19	78,95

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

## Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikannya, dengan kata lain APM mengukur proporsi anak yang sekolah tepat waktu. APM dibagi dalam 3 jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SLTP untuk penduduk usia 13-15 tahun dan SLTA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Program pemerintah wajib belajar 9 tahun yang menjadi sasaran program tersebut adalah anak-anak usia 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SLTP). APM di Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 untuk jenjang SD adalah 97,41 persen, jenjang SLTP 73,60 persen. Sedangkan APM jenjang SLTA sebesar 70,30 persen.

**Tabel 4.3**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019**

Uraian	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>APM</b>				
• SD	93,48	96,37	96,98	97,41
• SLTP	78,30	78,46	75,01	73,60
• SLTA	64,81	65,68	69,80	70,30

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

# BAB 5

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019

# KETENAGAKERJAAN

<https://imkab.bps.go.id>

BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR



# BAB 5 - KETENAGAKERJAAN -

INKESRA



Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Manusia dalam hal ini tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di berbagai bidang. Karena di dalam proses produksi barang dan jasa, manusia merupakan faktor utama apabila dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang lain yaitu sebagai tenaga kerja yang dapat menjalankan dan menggunakan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Jumlah tenaga kerja yang tepat serta kualitas yang baik dapat meningkatkan jumlah produksi.

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Semakin besar kesempatan kerja yang dapat diraih oleh penduduk dalam suatu wilayah, semakin tinggi pula standar hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Peningkatan dalam jumlah angkatan kerja, bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

### 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan usia kerja adalah penduduk yang berumur 0-14 tahun. Perkembangan dari Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 5.1. Dalam publikasi ini PUK dibagi menjadi tiga kelompok usia yaitu 15-24, 25-54 dan 55+. Kelompok usia 15-24 tahun adalah kelompok usia yang sudah dikategorikan menjadi kelompok usia kerja, meskipun semestinya mereka masih harus sekolah. Kelompok usia 25-54 tahun adalah mereka yang produktif dalam pasar kerja, dan usia 55+ adalah mereka yang dianggap sudah kurang produktif lagi dalam pasar kerja.

**Tabel 5.1**  
**Perkembangan Persentase Penduduk Usia Kerja**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019**

Kelompok Umur	2016*	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-24	-	22,08	24,01	26,12
25-54	-	68,73	64,84	65,12
55+	-	11,64	11,15	8,76

*Keterangan* : \*Data Tidak Tersedia

*Sumber* : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa persentase penduduk usia kerja menurut kelompok umur 15-24 di Kabupaten Kutai Timur pada

tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018, dimana penduduk kelompok usia 15-24 tahun di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 sebesar 26,12 persen, dan kelompok usia produktif 25-54 tahun sebesar 65,12 persen. Sedangkan untuk usia kurang produktif 55 tahun atau lebih sebesar 8,76 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15 tahun keatas). Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun keatas) yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang cuti, dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (penganggur). Dari TPAK, kita dapat melihat persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja sehingga berpotensi untuk dapat memproduksi barang dan jasa. Selain itu, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan penganggur). Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang memasuki pasar kerja atau yang sesungguhnya terlibat secara ekonomi atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. TPAK Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 sebesar 69,23 persen. Dapat dilihat pula bahwa TPAK untuk penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dari penduduk perempuan. TPAK laki-laki sebesar 83,13 persen dan TPAK perempuan sebesar 51,89 persen.

**Tabel 5.2**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di**  
**Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019**

Jenis Kelamin	TPAK			
	2016*	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	-	86,64	85,31	83,13
Perempuan	-	42,18	49,74	51,89
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>66,75</b>	<b>69,4</b>	<b>69,23</b>

*Keterangan* : \*Data tidak tersedia

*Sumber* : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase penduduk yang tidak bekerja (tidak memiliki pekerjaan) tetapi sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (penganggur) terhadap penduduk yang termasuk angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja akan tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, seperti misalnya kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah

seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

**Tabel 5.3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019**

Jenis Kelamin	TPT			
	2016*	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	-	4,01	4,70	4,19
Perempuan	-	6,11	8,53	8,53
<b>Total</b>	-	<b>4,61</b>	<b>5,93</b>	<b>5,53</b>

*Keterangan* : \*Data tidak tersedia

*Sumber* : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

TPT pada tahun 2019 di Kabupaten Kutai Timur sebesar 5,53 persen, dimana mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 (5,93 persen). Bila dibedakan menurut jenis kelamin, TPT laki-laki selalu lebih rendah dibanding dengan TPT perempuan. TPT laki-laki tahun 2019 sebesar 4,19 persen dan TPT perempuan sebesar 8,53 persen.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK dapat menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Dari besarnya TKK, kita dapat melihat besarnya peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja merupakan masalah, karena mereka akan menganggur.

**Tabel 5.4**  
**Tingkat Kesempatan Kerja menurut Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019**

Jenis Kelamin	TKK			
	2016*	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	-	95,99	95,3	95,81
Perempuan	-	93,89	91,47	91,47
<b>Total</b>	-	<b>95,39</b>	<b>94,07</b>	<b>94,47</b>

*Keterangan* : \*Data tidak tersedia

*Sumber* : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

Pertambahan dan pengurangan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dipengaruhi oleh dinamika struktur umur, jenis kelamin dan perbedaan struktur ekonomi dan migrasi. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Tingkat kesempatan kerja akan selalu berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka. Jika TPT semakin besar, maka kesempatan kerja akan semakin kecil, dan sebaliknya jika kesempatan kerja besar berarti TPT akan semakin kecil.

TKK pada tahun 2019 di Kabupaten Kutai Timur sebesar 94,47 persen, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 (94,47 persen). Bila dibedakan menurut jenis kelamin, TKK laki-laki lebih tinggi dibanding dengan TKK perempuan. TKK laki-laki 95,81 persen dan TKK perempuan 91,47 persen.

## 5.2 Lapangan Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha/pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha/bidang kerja adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat penduduk bekerja.

**Tabel 5.5**  
**Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut**  
**Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Timur,**  
**Tahun 2016-2019**

Lapangan Usaha	2016*	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	-	39,56	36,77	31,20
Pertambangan dan Penggalian	-	9,42	10,06	10,65
Industri	-	2,93	3,41	2,29
Listrik, Gas dan Air	-	0,38	0,39	1,13
Konstruksi	-	2,52	3,42	6,08
Perdagangan	-	18,42	19,70	21,95
Pengangkutan dan Komunikasi	-	2,81	3,69	4,71
Keuangan	-	3,35	1,61	0,91
Jasa	-	20,61	20,95	21,07
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Keterangan* : \*Data tidak tersedia

*Sumber* : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Angkatan Kerja Nasional

## *Ketenagakerjaan*

Lapangan usaha dalam hal ini terbagi ke dalam Sembilan sektor, yaitu adalah sektor pertanian, mencakup sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih mencakup pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pengolahan air; sektor konstruksi; sektor perdagangan, mencakup perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor pengangkutan dan komunikasi mencakup pengangkutan dan pergudangan serta informasi dan komunikasi; sektor keuangan mencakup aktivitas keuangan dan asuransi; serta sektor jasa mencakup aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, aktivitas jasa lainnya, serta jasa pendidikan.

Banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam suatu sektor perekonomian dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Hingga tahun 2019, sektor pertanian masih tetap merupakan sektor tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur. Namun, pada tahun 2019 persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2018.

Pada Tabel 5.5 terlihat bahwa persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2019 sekitar 31,20 persen. Sektor lain yang juga menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 10,65 persen di tahun 2019 dimana mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun

2018 (10,06 persen). Sektor jasa juga mempunyai peran yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 21,07 pada tahun 2019 di mana terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yakni sebesar 20,95 persen.

<https://kutimkab.bps.go.id>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<https://kutimkab.bps.go.id>

# BAB 6

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019

## PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK MISKIN

BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR



# BAB 6 PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN KEMISKINAN

INKESRA



Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka dilakukan pendekatan melalui pengeluaran rumah tangga.

Pola pengeluaran dapat mencerminkan tingkat kehidupan masyarakat. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Di negara-negara yang sedang berkembang, pengeluaran untuk keperluan makan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Di negara-negara maju, pengeluaran bukan makanan merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga karena pengeluaran makanan bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan yang utama. Pengeluaran primer sudah bergeser kepada pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya.

## 6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberi gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Terjadinya perubahan pengeluaran atau pergeseran proporsi pengeluaran untuk makanan dapat menunjukkan ada atau tidaknya peningkatan taraf kehidupan rumah tangga. Semakin besar konsumsi/pengeluaran rumah tangga terutama porsi pengeluaran

untuk bukan makanan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik. Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pengeluaran makanan yang merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat ditunda dan juga sebaliknya untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

**Tabel 6.1**  
**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan menurut**  
**Jenis Kelompok Makanan (Rp) di Kabupaten Kutai Timur**  
**Tahun 2019**

<b>Jenis Kelompok Makanan</b>	<b>Pengeluaran (Rupiah)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Padi-padian	76.121
Umbi-umbian	6.405
Ikan	92.179
Daging	42.354
Telur dan susu	51.824
Sayur-sayuran	65.514
Kacang-kacangan	15.765
Buah-buahan	44.016
Minyak dan kelapa	17.609
Bahan minuman	25.895
Bumbu - bumbu	19.527
Bahan makanan lainnya	17.147
Makanan dan minuman jadi	246.108
Rokok danTembakau	106.199
<b>Total Makanan</b>	<b>826.664</b>

*Sumber :BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Konsumsi makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut, setiap orang perlu mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang, serta aman. Dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam setiap hari, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berlaku bijak dalam memilih makanan, tidak semata hanya mempertimbangkan status sosial-ekonomi makanan, namun juga harus seimbang dengan manfaat makanan tersebut untuk kesehatan dan tumbuh kembang optimal.

Pada Tabel 6.1 dapat dilihat rata-rata konsumsi makanan per kapita sebulan menurut sub kelompoknya di Kutai Timur tahun 2019. Pada tahun 2019 rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan sebulan sebesar Rp 826.664,00. Di mana, sub kelompok makanan dan minuman jadi memiliki pengeluaran terbesar, yaitu senilai Rp 246.108,00. Sedangkan pengeluaran makanan terkecil adalah sub kelompok umbi-umbian, yakni sebesar Rp 6.405,00

**Tabel 6.2**  
**Rata-rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan menurut**  
**Jenis Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Kutai Timur,**  
**Tahun 2019**

<b>Jenis Kelompok Bukan Makanan</b>	<b>Pengeluaran (Rupiah)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	510.277
Aneka barang dan jasa	194.995
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	46.702
Barang tahan lama	112.625
Pajak, pungutan, dan asuransi	65.990
Keperluan pesta dan upacara	35.202
<b>Total bukan makanan</b>	<b>965.790</b>

*Sumber ; BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Berdasarkan pengalaman, semakin tinggi tingkat pendapatan, proporsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan semakin berkurang, begitu pula sebaliknya. Pola pengeluaran penduduk sebulan untuk bukan makanan ditampilkan pada Tabel 6.2. Nampak bahwa dari tahun ke tahun pengeluaran untuk sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga mempunyai porsi terbesar bila dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan lainnya. Pengeluaran sub kelompok keperluan pesta dan upacara merupakan pengeluaran dengan porsi paling kecil. Pada tahun 2019 pengeluaran untuk sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, rata-rata per kapita sebulan sebesar Rp 510.277,00 dan untuk sub kelompok

keperluan pesta dan upacara rata-rata per kapita sebulan sebesar Rp 35.202,00

## **6.2 Penduduk Miskin**

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang umumnya selalu dihadapi oleh sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan penyakit sosial di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak sesuai dengan standar tertentu sehingga dikategorikan miskin. Banyaknya kemiskinan secara umum merupakan indikasi lemahnya perekonomian dari suatu wilayah. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan ekonomi di antaranya akan tercermin dari keberhasilan program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan sehingga standar yang digunakan untuk menentukan penduduk sebagai penduduk miskin atau bukan miskin adalah garis kemiskinan.

**Tabel 6.3**  
**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di**  
**Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2015-2019**

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
2015	29 570	9,31
2016	30 170	9,16
2017	31 950	9,20
2018	33 020	9,22
2019	35 310	9,48

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan penduduk miskin sebanyak 35.310 jiwa, terjadi peningkatan bila dibanding dengan tahun sebelumnya (33.020 jiwa). Secara persentase penduduk miskin naik dari 9,22 persen pada tahun 2018 menjadi 9,48 persen pada tahun 2019.

**Tabel 6.4**  
**Nilai Batas Garis Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur,**  
**Tahun 2019**

Tahun	Nilai Batas Garis Kemiskinan (Rp)
(1)	(2)
2015	431 328
2016	470 228
2017	512 345
2018	543 442
2019	569 449

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur, 2018

## *Pengeluaran Rumah Tangga & Kemiskinan*

Garis kemiskinan sebagai dasar penghitungan penduduk miskin pada tahun 2019 meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Kutai Timur, garis kemiskinan meningkat dari Rp 543.442,00 pada tahun 2018, menjadi Rp 569.449,00 pada tahun 2019.

<https://kutimkab.bps.go.id>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<https://kujimkab.bps.go.id>

# BAB 7

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2019

# PERUMAHAN

BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR



## BAB 7 - PERUMAHAN -



Salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap derajat kesehatan manusia adalah keadaan lingkungan. Hal ini dikarenakan manusia dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan sehat akan melahirkan manusia sehat. Begitu juga orang-orang yang sehat akan menghasilkan lingkungan yang sehat pula.

Rumah merupakan lingkungan yang paling dekat dengan manusia. Rumah adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh manusia dalam usaha melangsungkan kehidupannya. Rumah juga merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk selain sandang dan pangan. Rumah berfungsi untuk melindungi fisik dari hujan dan panas dan juga sebagai tempat perlindungan dari serbuan binatang buas dan keganasan alam lainnya. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka fungsi rumah mengalami perkembangan, tidak saja untuk tempat berlindung dari pengaruh kondisi alam, tetapi juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis atau kejiwaan, gaya hidup, status sosial, dan sebagainya. Dilihat dari sudut kejiwaan, rumah merupakan basis terbentuknya kepribadian dan watak manusia. Dalam lingkungan rumah suatu individu mengenal norma-norma tertentu dan adat kebiasaan yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat di sekitarnya. Begitu besar peran dan arti sebuah rumah, membuat semua orang

## *Perumahan dan Lingkungan*

selalu berusaha meningkatkan kualitas rumah dan fasilitas rumahnya agar dapat mendukung segala aktivitasnya.

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang terdapat di rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya dapat terlihat dari sumber air minum, jarak sumber air minum ke tempat pembuangan limbah terdekat, fasilitas buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya serta mendukung dalam terwujudnya kesehatan anggota rumah tangga.

### **7.1 Fasilitas Rumah Tinggal**

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal yang juga menentukan kualitasnya. Fasilitas rumah tinggal yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah ketersediaan air bersih, jamban sendiri, jamban dengan tangki septik, dan penerangan listrik.

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Di antara kegunaan-

kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum, air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih. Jenis sumber air minum merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk, baik dilihat dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dalam hal ini penggunaan sumber air minum dapat dijadikan petunjuk adanya perbaikan kesejahteraan penduduk. Berikut ini ulasan singkat, jamban sendiri, jamban dengan tangki septik, penerangan listrik, dan ketersediaan air bersih

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa rumah tangga yang mempunyai jamban sendiri di Kabupaten Kutai Timur mencapai 92,18 persen. Sedangkan rumah tangga yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir berupa tangki septik sebanyak 87,74 persen. Fasilitas penting lainnya adalah penerangan. Akses masyarakat terhadap penerangan dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka, disamping juga disadari adanya hubungan timbal balik di mana tingkat kehidupan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses sumber-sumber energi seperti penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik karena cahaya yang dihasilkan lebih terang dibandingkan dengan sumber penerangan lain. Rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik

baik itu listrik PLN maupun listrik non PLN di Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 telah mencapai 99,68 persen.

**Tabel 7.1**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2016-2019**

<b>Fasilitas Perumahan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jamban Sendiri	80,99	91,91	90,14	92,18
Jamban dengan Tangki Septik	66,65	79,71	83,35	87,74
Penerangan Listrik PLN / non PLN	93,3	98,15	99,16	99,68

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pada tahun 2019 rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur yang menggunakan air leding mengalami peningkatan menjadi 9,72 persen dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,11 persen. Kenaikan tersebut juga dibarengi dengan peningkatan penggunaan air kemasan sebagai sumber air minum, di mana mengalami peningkatan hingga mencapai 6,86 persen, yaitu mencapai sebesar 77,11 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 70,25 persen. Penggunaan air melalui sumur bor, air sumur terlindung dan tak terlindung, serta air permukaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (lihat Tabel 7.2). Di mana, persentase rumah tangga dengan sumber air minum utama adalah sumur bor/pompa mengalami penurunan dari 0,37 persen menjadi 0,14 persen di tahun 2019. Sedangkan persentase rumah tangga

dengan sumber air minum utama adalah sumur terlindung/sumur tak terlindung mengalami penurunan dari 11,18 persen menjadi 7,56 persen di tahun sebelumnya. Di samping itu, masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari air permukaan, air hujan, dan lainnya. Di mana, persentase rumah tangga dengan sumber air minum utama adalah air permukaan, air hujan, lainnya juga mengalami penurunan secara signifikan dari 10,32 persen menjadi 2,86 persen di tahun 2019. Sumber air minum tak terlindung yang masih dikonsumsi masyarakat hingga saat ini dapat menyebabkan masalah kesehatan. Namun, kebiasaan masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk merebus air tersebut sebelum diminum merupakan salah satu upaya guna dapat mencegah masyarakat dari penyakit.

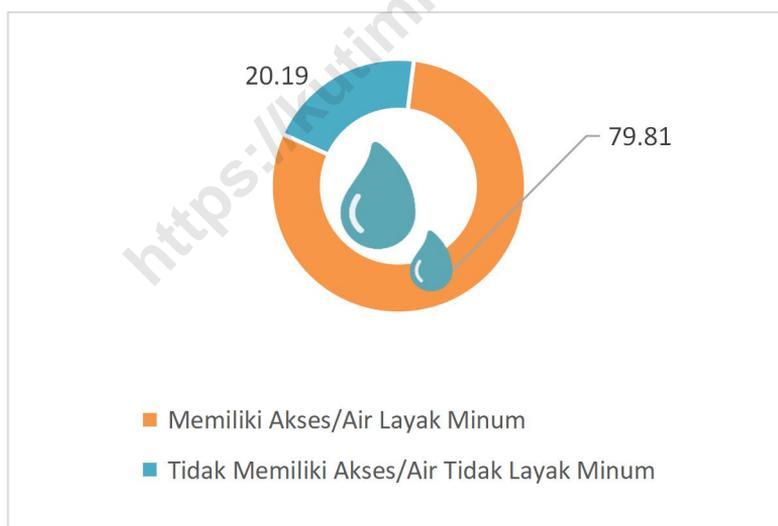
**Tabel 7.2**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2018-2019**

Sumber Air Minum	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Leding	7,11	9,72
Air Kemasan/Air Isi Ulang	70,25	77,11
Sumur Bor/Pompa	0,37	0,14
Sumur Terlindung/Sumur Tak Terlindung	11,18	7,56
Mata Air Terlindung/Mata Air Tak Terlindung	0,77	2,61
Air Permukaan/Air Hujan/Lainnya	10,32	2,86
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Air minum layak terdiri dari air yang bersumber dari leding meteran, leding eceran, air terlindung (sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak  $\geq 10$  meter dari tempat penampungan kotoran/limbah dan air hujan, sedangkan air kemasan terdiri dari air kemasan bermerk dan air isi ulang. Sementara itu untuk air minum tidak layak terdiri dari air yang minum yang bersumber dari sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai dan air lainnya.

**Grafik 7.1**  
**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Akses Air Minum Layak dan Air Minum Tidak Layak di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Menurut grafik 7.1, selama tahun 2019 sebanyak 79,81 persen rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur telah menggunakan/mempunyai akses air minum layak dan sisanya (20,19

persen) tidak menggunakan/tidak mempunyai akses air minum tidak layak. Apabila disandingkan dengan Tabel 7.2, berdasarkan Tabel 7.2, penggunaan air minum tidak layak layak oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur di tahun 2019 cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, akses penduduk terhadap sumber air berkualitas dinilai semakin terbuka dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut [sirusa.bps.go.id](http://sirusa.bps.go.id), semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah tersebut.

Dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman, maka masalah pembuangan limbah/kotoran meningkat. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan limbah rumah tangga merupakan masalah pokok yang harus ditanggulangi sedini mungkin. Karena kotoran manusia adalah sumber penyebaran penyakit yang multikompleks. Penyebaran penyakit yang bersumber dari limbah/kotoran dapat melalui beberapa cara atau jalan antara lain yaitu melalui air, tangan, lantai, dan tanah. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan limbah/kotoran disertai dengan cepatnya penambahan jumlah penduduk, jelas akan mempercepat penyebaran penyakit.

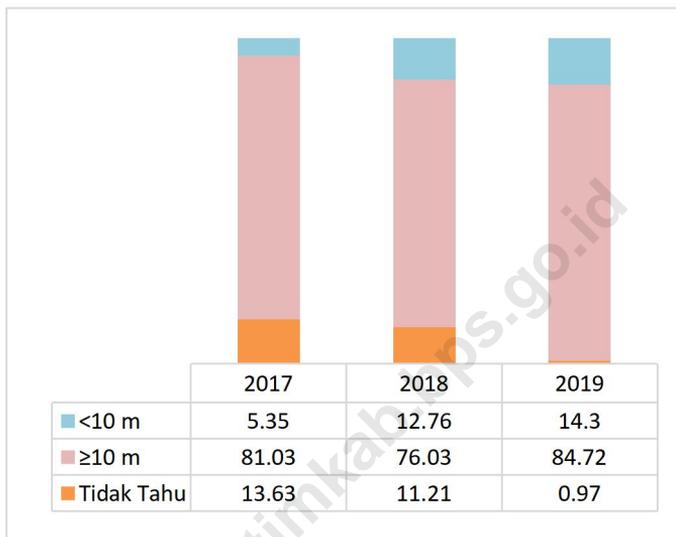
Tempat pembuangan limbah terdekat sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat pembuangan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar, misalnya seperti tempat pembuangan berupa lubang tanah atau tanah terbuka dapat mencemarkan sumber air di dekatnya dan dapat menimbulkan

## *Perumahan dan Lingkungan*

bau yang tidak sedap. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia juga tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Jarak sumber air minum, seperti sumur dan mata air dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat patut menjadi perhatian. Jarak sumber air minum, terutama yang berasal dari sumur dan mata air, dengan tempat pembuangan limbah terdekat merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesehatan air minum rumah tangga. Semakin pendek jarak tersebut, maka kemungkinan sumber air minum tersebut tercemar zat-zat ataupun unsur-unsur yang membahayakan kesehatan manusia semakin besar. Jarak yang aman dan ideal untuk tempat pengambilan air minum ke tempat penampungan kotoran adalah 10 meter lebih. Karena dengan jarak ini rembesan dari air limbah tidak bisa meresap sampai ke sumur atau mata air. Indikator ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air minum dari sumur atau mata air yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan limbah terdekat.

**Grafik 7.2**  
**Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Pembuangan Limbah**  
**Terdekat di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2019 (meter)**



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan Grafik 7.2 pada tahun 2019, jarak sumber air minum ke tempat pembuangan limbah lebih dari sama dengan 10 meter cukup tinggi yaitu sekitar 84,72 persen. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 (76,03 persen). Namun masih terdapat penduduk di Kutai Timur yang menggunakan air minum dari sumur atau mata air yang berjarak kurang dari 10 meter dari tempat pembuangan limbah terdekat (14,3 persen) dan sebanyak 0,97 persen rumah tangga tidak mengetahui jarak antara sumber air minum yang digunakan ke tempat pembuangan limbah terdekat.

## **7.2 Kualitas Rumah Tinggal**

Rumah dikatakan layak sebagai tempat tinggal apabila rumah tersebut mempunyai atap, dinding, dan lantai. Dari ketiga unsur tersebut dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis lantai, luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding yang digunakan.

Ditinjau dari segi kesehatan, jenis lantai yang digunakan rumah tangga juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Rumah yang memenuhi syarat kesehatan harus memiliki konstruksi lantai yang rapat air dan selalu kering, agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu, juga dapat menghindari kelembaban air tanah naik ke lantai. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Lantai tanah dinilai kurang baik karena dapat berdebu pada saat musim kemarau dan akan basah pada musim hujan. Lantai yang basah dan berdebu merupakan tempat timbulnya kuman penyakit dan menjadi media penularan berbagai jenis penyakit. Berdasarkan data dari Susenas pada tahun 2019 di Kabupaten Kutai Timur persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai kayu/papan sebesar 64,30 persen, terjadi penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69,33 persen.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi rumah sehat diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal per orang. Luas lantai tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan

dengan sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Luas lantai erat hubungannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangganya. Luas lantai bangunan rumah harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya.

Selain menggambarkan tingkat kesehatan, luas lantai juga dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga. Menurut *American Public Health Association* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2019, di Kabupaten Kutai Timur terdapat 80,49 persen rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai perorang lebih dari 10 m<sup>2</sup>. Dengan luas lantai terluas merupakan kayu/papan kualitas tinggi sebesar 64,30 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan sebagai tempat tinggal adalah penggunaan atap dan dinding. Persyaratan rumah sehat antara lain memiliki konstruksi bangunan cukup kuat. Salah satu ciri konstruksi bangunan yang cukup kuat adalah memiliki konstruksi atap yang cukup rapat dan tidak tiris. Jenis atap terluas yang digunakan sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur adalah atap seng.

**Tabel 7.3**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan**  
**di Kabupaten Kutai Timur, Tahun 2017-2019**

Kualitas Perumahan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Kayu/Papan Kualitas Tinggi	65,71	69,33	64,30
Luas Lantai perkapita > 10 m <sup>2</sup>	81,12	81,16	80,49
Atap Seng	88,13	86,04	85,67
Dinding Kayu atau batang kayu	78,09	80,38	77,11

*Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur, Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Di samping itu, jenis dinding rumah juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Persyaratan rumah sehat salah satunya memiliki konstruksi dinding luar yang kuat. Jenis dinding yang baik adalah tembok atau kayu. Dinding rumah sebaiknya kering agar ruangan tidak menjadi lembab, karena dinding yang lembab menimbulkan resiko terjadinya penyakit. Sedangkan dinding bambu dan lainnya tidak baik untuk kesehatan.

Pada tahun 2019 persentase rumah tangga di Kabupaten Kutai Timur yang menggunakan bahan seng sebagai atap rumahnya adalah sebesar 85,67 persen. Tempat tinggal yang berdinding dengan bahan kayu atau batang kayu 77,11 persen. Indikator jenis atap berupa seng serta dinding berupa kayu atau batang kayu mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2018.

Penurunan persentase beberapa indikator kualitas rumah tinggal, seperti lantai kayu/papan kualitas tinggi, atap seng, serta

dinding kayu atau batang kayu di antaranya disebabkan oleh beralihnya preferensi masyarakat untuk meng-*upgrade* material untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya. Penurunan beberapa komponen tersebut didorong oleh peningkatan beberapa komponen, yakni peningkatan persentase kondisi perumahan rumah tangga dengan lantai terluas adalah keramik, atap yang digunakan adalah genteng, serta dinding yang digunakan adalah tembok.

Sedangkan penurunan indikator luas lantai per kapita mengindikasikan semakin padatnya wilayah permukiman penduduk. Dengan demikian, hal tersebut berdampak pada semakin terbatasnya ruang gerak penduduk.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<https://kujimkab.bps.go.id>